

BI Siapkan Mata Uang Digital

Tanggal : Jum'at , 26 Februari 2021
 Media : Investor Daily
 Halaman : 6
 Wartawan : Arnoldus Kristianus
 Muatan Berita : Netral
 Narasumber : Perry Warjiyo (*Gubernur BI*), Ari Kuncoro (*Ekonom UI*)
 Rubrik : Macro Economics
 Topik : Kripto

PENGUNAAN CRYPTOCURRENCY MELUAS

BI Siapkan Mata Uang Digital

Oleh Arnoldus Kristianus

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) tengah menyiapkan pembentukan mata uang rupiah digital yang disebut *central bank digital currency*. Pembentukan mata uang digital ini dilakukan untuk mengantisipasi maraknya penggunaan mata uang kripto atau *cryptocurrency*, salah satunya Bitcoin.

"Kami dalam proses merumuskan yang disebut *central bank digital currency*. Dalam konteks ini, kami juga melakukan kerja sama yang erat dengan bank sentral lain untuk menyusun dan mengeluarkan *central bank digital currency*," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Economic Outlook: Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia 2021, Kamis (25/2/2021).

Bitcoin, salah satu mata uang kripto, menunjukkan fenomena kenaikan harga yang terus melaju. Berdasarkan data Trading Economics, harga satu Bitcoin pada Kamis (25/2/2021) tercatat Rp 723.571.200,00, setelah sempat mencapai angka tertinggi Rp 787.199.433,80 pada Jumat (19/2). Padahal, pada Februari

tahun lalu satu Bitcoin masih seharga Rp 120 jutaan. Menurut Perry, nantinya bank sentral akan menjadi pengelola, yaitu yang menerbitkan dan mengedarkan *central bank digital currency* tersebut ke perbankan dan teknologi finansial (*fintech*), baik secara *wholesale* maupun ritel.

Menyusul tren penggunaan *cryptocurrency* yang meluas sebagai alat pembayaran, terutama Bitcoin, Perry kembali menegaskan, satu-satunya mata uang yang sah sebagai alat pembayaran di Indonesia adalah rupiah. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

"Sesuai UUD 45, di Indonesia hanya ada satu mata uang,

(yaitu) yang disebut rupiah. Jadi, seluruh alat pembayaran menggunakan koin, menggunakan uang kertas, menggunakan uang digital, itu harus menggunakan rupiah dan wewenangny ada di BI," tandas dia.

Secara terpisah, ekonom senior yang juga Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro berpendapat, keberadaan mata uang digital dari BI akan menjadi alternatif alat pembayaran dan instrumen investasi bagi masyarakat. BI bisa memasukkan mata uang tersebut dalam *contestable market* yang tetap bisa diatur apabila dijadikan portofolio investasi oleh masyarakat.

"Karena dia alat pembayaran, maka dia harus dikontrol. Kalau tidak, kita akan kehilangan kedaulatan moneter (*monetary sovereignty*). Paling *enggak*, kita bisa mempengaruhi," (bisa) mengendalikan," ucap Ari saat dihubungi *Investor Daily* pada Kamis (25/2).

Timbul Ketidakstabilan

Ari menjelaskan, selama ini daya beli masyarakat diukur dari peredaran uang, kartu kredit, dan penggunaan anjungan tunai mandiri (ATM). Dengan adanya Bitcoin maka timbul alat investasi baru, tetapi berisiko. Oleh karena itu, BI bertugas untuk mengatur uang beredar, namun

selama ini penggunaan Bitcoin berada di luar kontrol BI.

"Dengan adanya mata uang digital ini, BI bisa mengetahui peredaran uang yang terjadi di masyarakat. Jadi, akan ada keseimbangan internal (inflasi) dan keseimbangan eksternal (mata uang beredar/nilai tukar). Kalau ini *nggak* dikontrol oleh BI, akan menimbulkan ketidakstabilan," ucap Ari.

Ia menambahkan, bila nanti mata uang digital BI ini berkembang, bank sentral bisa menunjuk mitra perbankan untuk mendistribusikannya. Masyarakat pun bisa membandingkan mana mata uang yang aman, mata uang digital BI atau Bitcoin yang berasal dari luar negeri. "BI juga akan melihat faktor itu supaya seimbang antara luar atau dalam negeri," ucap Ari.

Sebelumnya, seperti diberitakan *Investor Daily* pada Kamis (25/2/2021), bank sentral dari Tiongkok, Thailand, Uni Emirat Arab (UEA), dan Hong Kong dilaporkan sedang membahas proyek pembayaran lintas batas dengan menggunakan mata uang digital.

Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) dan Bank of Thailand (BoT) tahun lalu bekerja sama untuk mempelajari aplikasi mata uang digital bank sentral atau *central bank digital currencies*



(CBDC). Kerja sama itu kemudian diperluas dengan melibatkan institut penelitian mata uang digital di bawah People's Bank of China's (PBoC) dan bank sentral UEA.

CBDC saat ini sudah mendapatkan perhatian dari otoritas moneter di seluruh dunia, khususnya terkait upaya bank-bank sentral untuk mendigitalkan mata uang fiat mereka. Tapi, persoalan muncul karena teknologi yang digunakan masing-masing bank sentral berbeda.

Grup bank sentral yang dipimpin HKMA dan BoT sedang mempelajari teknologi buku besar terdistribusi atau *distributed ledger technology* (DLT). Teknologi

ini mengacu pada basis data yang dapat direplikasi dan dibagikan antar lembaga yang terlibat dan mencatat transaksi.

Basis data ini tidak perlu dimiliki oleh satu bank sentral, tapi merupakan sebuah aktivitas buku besar bersama. DLT dipandang sebagai cara untuk membuat pembayaran lintas batas lebih efisien. "Proyek ini akan mempelajari cara-cara penggunaan DLT untuk memfasilitasi transaksi lintas batas pembayaran versus pembayaran valuta asing," kata HKMA, seperti dikutip *CNBC*.

PBoC Bergerak Cepat Sementara itu, PBoC sudah

bergerak lebih cepat dengan versi dalam negeri dari proyek ini. Tiongkok sudah menguji coba yang disebut sistem pembayaran elektronik dengan mata uang digital. Penggunaan mata uang digital ini masih berfokus untuk pembayaran transaksi di dalam negeri.

Selama beberapa bulan terakhir, otoritas Tiongkok sudah menyerahkan yuan digital dalam jumlah besar, melalui undian, kepada warga di beberapa kota, termasuk Shenzhen dan Chengdu. Keterlibatan Tiongkok dalam proyek bersama Hong Kong, Thailand, dan UAE itu dipandang sebagai bagian dari upaya internasionalisasi yuan. (ns)